

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KAKAO DI DESA TAAN KECAMATAN TAPALANG KABUPATEN MAMUJU

Muh Asran Z Labaran¹, Lukman Hakim², Rudi Hardi¹
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar
Jl Sultan Alauddin No 259 Makassar 90221
Telp. 0411-866972 ext. 107. Fax. 0411-8655888
Asran.Labaran@yahoo.com, rudi.hardi@gmail.com

²Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar
Jl Sultan Alauddin No 259 Makassar 90221
Telp. 0411-866972 ext. 107. Fax. 0411-8655888
lukmanhk@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the role of government in community empowerment cocoa farmers in the village of Taan District of Tapalang Mamuju regency and what factors influence the government in empowering cocoa farming communities. This type of research that is in use is qualitative. Data collection techniques in this study were interviews, observation and documentation. The results showed that the role of local government in empowering cocoa farming communities in the village of Taan District of Tapalang Mamuju regency has realized various programs as a form of government efforts to increase social welfare, but this policy is not performing well with a wide variety of factors. Some of the factors that affect local government's role in empowering communities cocoa farmers in the village of Taan District of Tapalang Mamuju supporting factors include: that government efforts to improve public education, production and capital assistance. While the inhibiting factors: the lack of institutional shade cacao cultivation in the society so that society can only mengandalkan their experience in the management of the cocoa plant.

Keywords: local government, empowering, cocoa farmers

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju dan Faktor apa yang mempengaruhi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao. Jenis penelitian yang di gunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju telah merealisasikan berbagai program sebagai bentuk upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan sosial, namun kebijakan ini tidak terlaksana dengan baik dengan berbagai macam faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju diantaranya faktor pendukung: adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, bantuan produksi dan modal. Sedangkan faktor penghambat: kurangnya kelembagaan yang menaungi masyarakat dalam pembudidayaan tanaman kakao sehingga masyarakat hanya bisa mengandalkan pengalaman mereka dalam pengelolaan tanaman kakao.

Kata Kunci : pemerintah daerah, pemberdayaan, petani kakao

A. LATAR BELAKANG

Secara mendasar salah satu tugas dan kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia karena secara tegas telah dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pernyataan tersebut memberi arti bahwa pemerintah mempunyai peranan sentral baik secara perencana, penggerak, pengendali, dan pengawas dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Kegagalan dan keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh kemampuan semua pihak yang terlibat dalam proses pengembangan masyarakat untuk memahami realitas masyarakat. Pentingnya pembangunan dan pemberdayaan ini merupakan mekanisme pembangunan nasional yang menjadikan masyarakat pada akhirnya berperan sebagai pelaku utama kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan tindak lanjut, untuk itulah diperlukan payung hukum bagi penyelenggaraan sistem pembangunan nasional yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan sesuai dengan spirit kebangsaan Indonesia yang tidak hanya dapat menjembatani konteks mikro ke dalam konteks makro tetapi juga sebaliknya menerjemahkan konteks makro ke dalam konteks mikro. Pentingnya memberikan mandat tentang keberpihakan pemerintah sebagai fasilitator dalam pembangunan nasional yang memberikan peran aktif kepada masyarakat partisipatif.

Pembangunan nasional dapat berjalan optimal dan mampu bersaing di pasar global, maka ketiga aspek tersebut harus mencakup secara seimbang dan ditunjang oleh kebijakan yang dibuat oleh sosial pemerintah yang pro pembangunan nasional. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan ditandai dengan adanya kemakmuran yaitu meningkatnya konsumsi yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dan pendapatan meningkat karena adanya peningkatan produksi yang selanjutnya membuka kesempatan kerja guna menciptakan pendapatan dan peluang bagi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Rasyid (1997) menyatakan bahwa "salah satu fokus kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial ini adalah dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang juga merupakan salah satu fungsi pemerintahan selain dari pada fungsi pembangunan dan fungsi pelayanan".

Proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program yang berkesinambungan, pemberdayaan masyarakat mengandung arti mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya.

Dalam memberdayakan masyarakat tentunya pemerintah berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah untuk menggenjot produksi kakao nasional sebesar 1,07 juta ton dilakukan dengan pelaksanaan Gernas Kakao di 25 provinsi. Gerakan nasional kakao dilakukan pada tiga kegiatan utama yaitu peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi. Dalam program ini juga dilakukan pembinaan

pada kelembagaan petani dan pemberdayaan petani itu sendiri. Sehingga diharapkan dengan kegiatan Gernas Kakao ini akan mengarah pada peningkatan produksi dan mutu kakao serta peningkatan kapasitas dan efektifitas kelembagaan di tingkat petani.

Keberadaan kelembagaan kelompok tani sangat penting diberdayakan karena potensinya sangat besar (BPS, 2012). Dari data ini, sebesar 72,12% kelompok masih tergolong dalam kelompok pemula, ini berarti bahwa sebagian besar petani yang ada masih dalam taraf pembentukan kelompok, secara formal memiliki seorang pemimpin namun kontak tani masih belum aktif dan kegiatan kelompoknya bersifat informatif.

B. KONSEP PEMBERDAYAAN

Pemberdayaan adalah membantu klien untuk memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki antara lain dengan transfer daya dari lingkungannya. (Priyono dan Pranaka, 1996: 2-8). Pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yakni mengarahkan masyarakatnya pada kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran didalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat berarti tidak bisa dilepaskan dan diserahkan begitu saja kepada masyarakat yang bersangkutan. Menurut Labolo (2011: 32) fungsi pemerintah terbagi atas beberapa bagian: (a) Fungsi pelayanan, pelayanan dikelompokkan menjadi pelayanan sipil dan jasa publik. Layanan sipil bersifat pelayanan yang meski

dilakukan terhadap orang perorangan, pribadi ataupun privat, sedangkan jasa publik bersifat kolektif karena itu mengandung nilai istimewa. Fungsi ini kemudian melahirkan defenisi penting tentang pemerintah sebagai suatu ilmu dimana pemerintah mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintah sehingga di terima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. (b) Fungsi pengaturan, Penyediaan jasa oleh pemerintah dapat disebut sebagai fungsi pengaturan yaitu perumusan dan menegakkan peraturan-peraturan bagi pemerintah daerah kuasanya untuk mengatur kegiatan-kegiatan khusus misalnya, tata guna tanah, standar bangunan, hiburan, pelayanan publik dan sebagainya. (c) Fungsi pembangunan, pemerintah regional mungkin terlibat langsung dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi, seperti pengoprasian pabrik-pabrik, perkebunan, kehutanan, dan usaha perdagangan. Kegiatan semacam itu tentunya lazim di Negara-negara sosial. Di Negara lain hal itu dapat diusahakan untuk mempribumikan kepentingan usaha asing untuk mendorong dan member contoh kepada pihak swasta. Melalui fungsi pembangunan ini pemerintah diharapkan bisa mendukung perusahaan swasta untuk meningkatkan sarana dan prasarana dan melalui penyuluhan kepada masyarakat dalam bidang-bidang pertanian, peternakan, perikanan atau industri.

Menurut *Muflich* (2006). Pemberdayaan masyarakat yang optimal agar mampu memberdayakan diri menjadi lebih baik harus dengan terlibatnya pemerintah secara optimal dan mendalam. Dengan berbagai interpretasi yang bervariasi, saat ini

hampir semua departemen maupun Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) memiliki program pemberdayaan masyarakat sebagaimana terefleksi dalam renstranya masing-masing demikian juga di daerah, hampir semua dinas juga memiliki program yang serupa. Beberapa daerah bahkan membentuk unit kerja otonomi untuk mengawal proses koordinasi yang lebih baik dan menjamin terlaksananya pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dibawah Gubernur, Bupati, Walikota yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM).

Menurut pranarta dan priyono (2004:41) pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status, mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Konsep pemberdayaan masyarakat ini muncul karena adanya kegagalan sekaligus harapan. (Kartasmita, 1997: 55).

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan

mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang.

Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Friedman (1992) menyatakan "*The empowerment approach, which is fundamental to an alternative development, places the emphasis on autonomy in the decision making of territorially organized communities, local self-reliance (but not autarchy), direct (participatory) democracy, and experiential social*

learning". *Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Upaya penanggulangan kemiskinan yang bertumpu pada masyarakat lebih dimantapkan kembali melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) mulai tahun 1998-1999 yang merupakan penguatan program-program pemberdayaan masyarakat. PPK merupakan perluasan dari program IDT dan P3DT yang memberikan perhatian pada upaya penguatan kelembagaan masyarakat lokal yang ada di tingkat Desa dan Kecamatan baik formal maupun informal, seperti pokmas IDT, kelompok tradisional, LKMD dan Forum Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), khusus dalam PPK di dukung oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK).

PPK bermaksud meningkatkan keterpaduan pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan prasarana dan sarana pedesaan. PPK dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme pelaksanaan yang bertumpu pada peran serta aktif masyarakat yang merupakan langkah nyata pemberdayaan masyarakat. Untuk itu khususnya aparat pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pendamping dan memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan PPK. PPK akan mengembangkan hubungan yang lebih kuat antara Kecamatan dan Desa, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dan pelaksanaan di tingkat lebih bawah guna meningkatkan keterbukaan (transparansi), efisiensi, dan pengelolaan dana pembangunan secara lebih efektif.

Pemberdayaan yang dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah suatu program yang didesain dengan pendekatan partisipatif dan informatif dengan menyediakan dana langsung bagi masyarakat melalui Kecamatan dan melembagakan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) serta forum Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP). Dalam hal ini PPK berupaya mengembangkan hubungan yang lebih kuat antara Kecamatan dan desa, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dan pelaksanaan di tingkat lebih bawah guna meningkatkan keterbukaan (transparansi), efisiensi, dan pengelolaan dana pembangunan secara lebih efektif.

Pendekatan bantuan PPK ini diwujudkan dalam bentuk: (1) Partisipasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan melestarikan pembangunan; (2) Pemberian kepercayaan kepada masyarakat untuk

memilih kegiatan yang dibutuhkan; (3) Pemihakan pada penduduk miskin; (4) Pemberian akses informasi kepada setiap penduduk desa mengenai peluang, kebebasan memilih, dan memutuskan; (5) Penciptaan suasana kompetisi yang sehat dalam pengajuan usulan kegiatan; (6) Penerapan teknologi tepat guna dan padat karya; dan (7) Penggalakkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian pembangunan.

Dalam PPK dikenal dengan Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang merupakan unit pengelola dana yang berada di tingkat Kecamatan, di dalamnya terdapat pengurus mengawasi proses pengadaan pembangunan sarana/prasarana yang menunjang kegiatan sosial ekonomi di perdesaan. yang sifatnya mewakili masyarakat. UPK ini berfungsi untuk mengelola keuangan dan mengawasi proses pengadaan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan sosial ekonomi di perdesaan. UPK ini berperan sebagai lembaga keuangan milik masyarakat yang dapat menampung dan mengelola berbagai program pembangunan yang masuk ke daerah. Sehingga berbagai program pembangunan yang masuk ke daerah, dananya dapat langsung dikontrol dengan mudah oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian kebocoran-kebocoran dana bantuan program pembangunan dapat diminimalisir bahkan dapat dihilangkan. Kontrol publik ini merupakan upaya yang sangat efektif dalam mengantisipasi segala kemungkinan kebocoran dalam pengelolaan program-program pembangunan di daerah.

UPK ini dapat berkembang menjadi lembaga keuangan alternatif milik masyarakat yang tumbuh dari masyarakat sendiri. Lembaga keuangan ini dapat menjadi embrio lembaga

keuangan dengan prinsip-prinsip perbankan yang pelaksanaannya dengan menerapkan prinsip-prinsip kebersamaan (kooperatif). Dalam perkembangan selanjutnya lembaga keuangan ini dapat berbadan hukum misalnya seperti koperasi. Peran lembaga keuangan dalam pengembangannya antara lain: *pertama*, mempersiapkan terciptanya akses atau kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh bantuan. *Kedua*, mempersiapkan masyarakat lapisan bawah untuk dapat mendayagunakan bantuan tersebut sehingga dapat menjadi modal bagi kegiatan usaha. *Ketiga*, menanamkan pengertian bahwa bantuan yang diberikan harus dapat menciptakan akumulasi modal dari surplus yang diperoleh dari kegiatan sosial ekonomi.

Fleksibilitas dana yang dikelola oleh UPK melalui PPK dalam bentuk *block grant* memungkinkan untuk dapat menjangkau kegiatan ekonomi yang lebih luas. Dalam rangka mencapai tujuan ketahanan pangan maka dana bantuan tersebut dapat diwujudkan melalui modal usaha dan pembangunan sarana prasarana penunjang di sektor pertanian. Pemberian pelayanan permodalan berupa pinjaman harus dapat ditempatkan dalam kerangka yang benar yaitu sebagai suatu injeksi atau suntikan sementara yang harus mampu menciptakan modal bagi kegiatan ekonomi masyarakat serta harus dapat meningkatkan produksi. Peningkatan produksi harus diikuti dengan meningkatnya pendapatan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraannya. Siklus ini yang kemudian harus menciptakan tabungan sebagai awal dari pemupukan modal sendiri yang mampu dihimpun oleh masyarakat penerima pinjaman tersebut.

Lembaga Kredit Mikro. Bantuan dana yang diberikan untuk PPK dalam bentuk *block grant* dalam pengelolaannya yang dilakukan oleh UPK diharapkan dapat lebih dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sektor keuangan. Pemberian modal melalui UPK merupakan dana bergulir yang dikelola oleh kelompok dan disalurkan kepada anggota sebagai pinjaman yang harus dikembalikan kepada kelompok dengan persyaratan sesuai kesepakatan anggota. Dari perputaran kegiatan yang dibiayai dengan dana UPK tersebut diharapkan tumbuh kemampuan menabung dan pemupukan modal diantara anggota kelompok sehingga kegiatan sosial ekonomi dan sekaligus taraf hidup anggota. Tata cara perguliran dana sepenuhnya dipercayakan kepada kelompok sesuai dengan budaya yang berlaku di masyarakat setempat berdasarkan prinsip kebersamaan atau perkoperasian. Hal-hal pokok yang perlu mendapat perhatian dalam memperkuat UPK antara lain: *pertama*, kesamaan persepsi dari pengelola program/proyek pembangunan di semua tingkatan yang berhubungan dengan pemberian pinjaman kepada masyarakat miskin.

Kesamaan persepsi ini menyangkut pentingnya pemupukan modal masyarakat. *Kedua*, dengan persepsi yang sama diharapkan muncul kesepakatan untuk menyempurnakan sistem pelayanan dari UPK yang ada sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal. *Ketiga*, penyempurnaan sistem pelayanan merupakan bagian dari upaya memadukan dan mensinkronkan pola pembinaan terhadap lembaga yang ada. Penyempurnaan ini perlu diikuti dengan penyusunan panduan tentang UPK sebagai pedoman bagi aparat dan

masyarakat. *Keempat*, seiring dengan penyusunan panduan adalah pembenahan dan penyegaran pengurus UPK yang sudah ada. Penyegaran ini dilakukan dengan pendidikan dan latihan bagi pengurus. *Kelima*, langkah-langkah tersebut sangat ditentukan oleh peran aktif dari semua *stakeholders* di semua tingkatan, baik dari tingkat pusat maupun dari daerah itu sendiri dalam mendukung upaya mengentaskan kemiskinan melalui kegiatan bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju. Jenis penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan objek yang diteliti. Data primer merupakan data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan, atau tempat penelitian yaitu masyarakat petani kakao yang ada dilokasi penelitian. Data sekunder ialah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan sumber-sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat, buku harian, sampai dokumen-doukmen resmi dari berbagai instansi pemerintah.

Informan dalam penelitian ini berasal dari dusun Kampung Baru, Dusun Serang, Dusun Pa'bettengan dan kalangan pemerintah yaitu Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mamuju. Teknik pengumpulan data pengumpulan data yaitu wawancara observasi, dan dokumentasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kakao Di Desa Taan Kecamatan Tapalang

Saat ini pemerintah Kabupaten Mamuju sudah melakukan upaya untuk

pencapaian propuksi kakao di beberapa wilayahnya seperti di Kecamatan Tapalang desa Taan. Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan pengadaan bantuan kepada petani kakao baik berupa sarana dan prasarana seperti Sarana produksi adalah input yang dibutuhkan dalam budidaya tanaman untuk mencapai tingkat produktivitas yang diinginkan. Sarana produksi ini terdiri dari sarana untuk memulai bertani, perawatan sampai pemanenan. Unit Pengolah hasil (UPH), pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah. *stakeholder* yang paling berperan dalam rantai sarana produksi adalah pedagang eceran maupun grosir dan UPH. Kedua *Stakeholder* ini yang berinteraksi langsung dengan petani dalam penyediaan sarana produksi seperti pupuk, bibit, pestisida dan alat pertanian. Sedangkan pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah berperan menyediakan pasokan pupuk, benih dan pestisida melalui bantuan kepada para petani.

Sehubungan dengan program dari pemerintah tersebut, maka saat ini pemerintah desa melaksanakan kegiatan berdasarkan regulasi dan bimbingan teknis dari pemerintah daerah melalui dinas perkebunan dan kehutanan Kabupaten Mamuju. Implementasi dari peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang sebagai berikut:

a) Penyedia Pelayanan;

Pemerintah Desa yang bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan telah menyiapkan wadah pelayanan kepada masyarakat dengan adanya kantor Unit Pelayanan Pertanian (UPP) untuk merespon keluhan atau permintaan masyarakat dalam pengelolaan pertanian

khususnya pada Petani Kakao. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan:

“Untuk pelayanan kita sudah punya kantor UPP melauai kantor ini masyarakat bisa mendatangi kantor ini jika mempunyai masalah atau membutuhkan sesuatu dalam tanamannya Insya allah kami akan fasilitasi”.
(wawancara dengan YY).

Kantor Unit Pelayanan Pernanian ini sangat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. Tapi permasalahan kemudian yakni kantor yang bertempat di Kecamatan Tapalang ini jarang terbuka. Sesuai dengan hasil wawancara dengan informan:

“Memang ada kantor perkebunan kita disini yang tempanya dekat dengan kapolsek Tapalang tapi itu kantor jarang terbuka karena katanya semua aktifitas pelayanan itu dilarikan ke mamuju, makanaya susah karena kita harus ke mamuju lagi untuk mendapat pelayanan”.
(wawancara dengan ABD).

Pemerintah Desa Taan yang bekerja sama dengan pemerintah Kecamatan telah melaksanakan dari program pemerintah daerah dalam upaya peningkatan produksi dan perbaikan mutu atau kualitas kakao, sehingga mempunyai kualitas dan bernilai jual yang lebih di pasar nasional maupun internasional. Tentunya dalam pelaksanaan program kerja tersebut tetap berpedoman dan mengacu kepada bimbingan teknis Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mamuju tapi tingkat pelayanan yang masih kurang karena tidak optimalnya pelayanan yang ada di kantor UPP di Kecamatan Tapalang, sebaiknya pemerintah harus memperhatikan itu agar lebih baik jika

kantor ini bisa dioptimalkan dengan baik sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik.

b) Implementasi peraturan pemerintah daerah;

Fungsi Pengaturan Pemerintah daerah Kabupaten Mamuju telah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pemerintah Kecamatan dan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan produktivitas kakao di Kecamatan Tapalang. Pemerintah mengatur masyarakat petani melalui kelompok-kelompok tani dengan mendampingi dalam proses baik dalam bentuk pengelolaan bantuan yang dari pemerintah seperti pupuk, bibit dan obat-obatan.

Desa Taan mempunyai koordinator Penyuluh atau Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) namun PPL ini masih merangkap terhadap desa-desa lain sehingga belum mampu menjangkau dalam satu minggu untuk melaksanakan pendampingan terhadap petani kakao di desa Taan yang secara spesifik masyarakat setempat masih melakukan secara mandiri dengan tingkat pengetahuan yang masih rendah. Berdasarkan hasil wawancara bahwa:

“Di Desa Taan itu memang mempunyai penyulu namanya Pak Yahya tapi merangkap ke desa-desa yang lain bukan cuma desa Taan saja. Jadi kalau mau mengadakan penyuluhan itu harus disesuaikan jadwal beliau karna banyak desa yang dia tangali”. (Wawancara dengan RD).

Selain itu, kendala utama yang ditemui di lapangan bahwa tenaga pendamping yang ada sekarang masih ada yang berlatar belakang keilmuan yang berbeda sehingga petani masih

kurang mendapat solusi yang jelas ketika mendapat kendala di lapangan.

“Memang kendala terbesar kita adalah tenaga penyuluh karena, kita sangat minim akan hal itu, kita memang masih mempunyai beberapa tenaga penyuluh yang ada tapi ada beberapa yang memang tidak berlatar keilmuan yang sama maksudnya tenaga penyuluh yang ada itu ada yang hanya tamatan SPG, sarjana Ekonmi dll. jadi tidak sejalan dengan keilmuan perkebunan sehingga penyuluh itu akan tau kulit luarnya saja mengenai isi yang mendalam tentang perkebunan pasti mereka akan mini akan hal itu. nahh ini lah yang menjadi kendala besar jika mereka terjun ke lapangan untuk melakukan penyuluhan”. (wawancara dengan SI).

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa fungsi pengaturan yang di jalankan oleh tenaga penyuluh yang ada di Desa taan itu tidak berjalan dengan maksimal di tambah lagi dengan permasalahan mengenai tenaga penyuluh yang ada itu kurang dalam bidang keilmuan yang perkait dengan pembudidayaan tanaman kakao.

c) Fungsi Pembangunan ekonomi

Fungsi Pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan dari suatu tipe perekonomian menjadi tipe lain yang lebih maju (*Hirschman*). Sedangkan menurut *Meier* dan *Baldwin*, pembangunan ekonomi adalah suatu proses, dengan proses dimana pendapatan nasional *real* suatu perekonomian bertambah selama suatu periode waktu yang panjang. Berdasarkan pengertian dari kedua tokoh tersebut, pembangunan dikatakan sebagai sebuah proses karena

pembangunan bukanlah suatu kegiatan yang momentum atau perbuatan yang selesai hanya dalam satu kali dalam suatu saat, melainkan pembangunan merupakan suatu kegiatan yang terus-menerus.

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan ekonomi, manusia, sosial budaya, dan politik di Indonesia, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, perluasan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.

Upaya perluasan lapangan kerja di dalam suatu negara dilakukan karena meningkatnya penawaran terhadap jumlah tenaga kerja sehingga mereka dapat disalurkan ke lapangan-lapangan yang tersedia agar tenaga kerja yang berlebihan tersebut semakin produktif. Keterkaitan jumlah tenaga kerja yang berlebihan tersebut, disebabkan adanya pertumbuhan penduduk yang cepat seperti yang dialami di negara-negara berkembang.

Perencanaan dan implementasi adalah sesuatu hal yang berkaitan satu sama lain serta merupakan turunan yang satu sama lain menjadi bagian yang tak terpisahkan namun terkadang perencanaan (*Planning*) berbeda dan berbanding terbalik dengan implementasi di lapangan karena disebabkan berbagai macam faktor eksternal yang mampu mempengaruhi kondisi lapangan maka seperti itulah yang terjadi di Desa Taan terhadap implementasi program yang menjadi jawaban terhadap pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Taan Kecamatanamatan Tapalang

Kabupatenupaten Mamuju. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan:

“Program pemberdayaan ini memang baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tapi yang menjadi masalah kemudian adalah terkadang pengaplikasiannya itu di luar dari jalur yang ada yahh karna bergai macam faktor seperti adanya orang ketiga sebagai perpanjangan tangan dalam pemberian bantuan di situlah terkadang sering terjadi pemanipulasian biasa kita kasi umpunya 10 liter bantuan bibit yang sampai pada masyarakat itu hanya sampai 5-6 liter. Ini yang menjadi kendala besar untuk birokrasi kita”.
(wawancara dengan MA).

Melalui kendala di lapangan yang dimungkinkan akan terjadi maka pemerintah daerah melakukan susunan dan standar operasional dalam perangkuman aspirasi di setiap lini dengan mengedepankan *Quick Respon* dari masing-masing kelompok tani.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kakao Di Desa Taan Kecamatan. Tapalang Kabupaten Mamuju

Dalam menjalani perannya, pemerintah tentunya membutuhkan adanya faktor Pendukung antara lain :

a) Kelembagaan;

Dengan adanya kelembagaan yang menaungi tentang pembudidayaan tanaman kakao, bisa membantu masyarakat dalam melakukan pengaduan tantang permasalahan-permasalahan yang signifikan tentang tanaman kakao. Sesuai hasil wawancara

dengan Kepala dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mamuju bahwa:

“Pemerintah Kabupaten Mamuju memang selalu menyediakan wadah kepada masyarakat untuk pendampingan dalam mengelolah tanaman petani, seperti kantor Unit Pelayanan Pertanian (UPP) sebagai posko pengaduan dan penyuluh yang dioperasikan di setiap Desa dan Kecamatan. Dengan adanya Penyuluh tersebut masyarakat bisa lebih terjangkau untuk diberdayakan”. (wawancara dengan MA).

Berdasarkan hasil wawancara ini menunjukkan adanya keinginan pemerintah ingin menguatkan kelembagaan khususnya dalam menghadapi keluhan masyarakat mengenai permasalahan tentang tanaman kakao. Masyarakat juga menyadari memang dengan adanya posko pengaduan ini, mereka akan lebih mudah dalam menghadapi masalah karena dengan setiap adanya permasalahan dalam pengelolaan tanaman kakao akan bisa langsung diadakan ke posko ini. Begitupun pernyataan dari hasil wawancara dengan masyarakat yang ada di desa Taan sebagai berikut:

“Dengan adanya posko ini tentunya masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan pengaduan permasalahan karena masyarakat tidak perlu lagi repot ke pemerintah Kabupaten untuk mengadakan permasalahan dan jika ingin mengajukan beberapa bantuan cukup dengan mendatangi posko ini”. (wawancara dengan JF).

b) Ketersediaan Lahan;

Ketersediaan Lahan Untuk wilayah Kecamatan Tapalang memiliki luas lahan pertanian sekitar 3431 Ha, dan memiliki tanaman menghasilkan kurang lebih 1000 Ha dan mencakup wilayah desa Taan. Di desa Taan sendiri mayoritas penduduk yang menjadi penghasilan utama ialah tanaman kakao. Sesuai hasil wawancara dengan kepala Desa Taan sebagai berikut:

“Di desa Taan memang kebanyakan dari penduduk yang ada itu bertani kakao bahkan hampir keseluruhan ini penduduk Desa Taan rata-rata petani kakao”. (wawancara dengan RD)

Dengan luas lahan yang mencukupi untuk melakukan pembudidayaan tanaman kakao tentunya pemerintah harus lebih memperhatikan masyarakat petani kakao yang ada di desa Taan Kecamatan Tapalang. Karena dengan perhatian pemerintah tentunya masyarakat yang ada di Desa Taan akan lebih mampu untuk mengembangkan diri dalam proses pembudidayaan tanaman kakao.

Masyarakat desa Taan memang lebih banyak mengandalkan tanaman berproduksi seperti kakao karena menurut mereka bahwa tanaman kakao itu bisa menjadi penghasilan utama, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Sesuai hasil wawancara dengan masyarakat bahwa :

“untuk masyarakat seperti saya yang tidak punya pekerjaan apa-apa, tentunya kakao saja saya jadikan penghasilan utama karena kakao kan bisa dipanen setiap minggu atau per dua minggu tidak sama dengan PNS yang sudah pasti dapat gaji setiap bulannya mereka itu sudah pasti. Tapi kita ini para petani tidak pasti penghasilan didapat

tergantung hasil panen saja”.
(wawancara dengan KM).

Dengan lahan yang mencukupi tentunya masyarakat akan senangtiasa memanfaatkan lahan tersebut untuk melakukan pembudidayaan tanaman coklat, dan dengan bantuan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya aktipitas pertanian akan lebih baik, dan masyarakat sendiri akan merasa sangat terbantu dengan adanya dukungan dari pemerintah dalam pembudidayaan tanaman kakao tersebut.

c) Sarana Produksi

Sarana produksi adalah input yang dibutuhkan dalam budidaya tanaman untuk mencapai tingkat produktivitas yang diinginkan. Produksi merupakan pemberian dari pemerintah daerah kepada pemerintah Desa sebagai wujud apresiasi pemerintah daerah untuk melaksanakan program-program pemerintahan. Adapun bentuk dukungan dari pemerintah kepada kelompok tani di Desa Taan kaitannya dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao dianggap telah terlaksana dan masyarakat sangat responsif karena bantuan tersebut dapat membantu dalam peningkatan produksi kakao.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan staf bidang produksi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupatenupaten Mamuju sebagai berikut :

“Dinas sudah menyediakan bantuan kepada masyarakat baik berupa sarana dan prasarana dalam pembudidayaan tanaman kakao, bantuan itu seperti: (1) Alat penjemuran Kakao; (2) Alat fermentasi; (3) Pupuk MCK (kandang); dan (4) Pestisida. Bantuan ini akan disalurkan kepada masyarakat melalui

kelompok-kelompok tani”.
(wawancara dengan SI).

Dengan adanya sarana produksi tersebut tentunya akan mengurangi beban masyarakat dalam bertani. saprodi tersebut sengaja di keluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi beban masyarakat dalam melakukan pembudidayaan tanaman kakao.

Selain dari faktor pendukung terdapat pula faktor Penghambat yang dihadapi oleh pemerintah yakni:

a) Minimnya Sumber Daya Pengetahuan Masyarakat Petani;

Rendahnya pengetahuan petani juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam peningkatan produksi kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju karena mereka kurang memperhatikan pengembangan seperti ini. Umumnya masyarakat senantiasa mengandalkan pengalaman pribadi dalam bercocok tanam yang turun-temurun.

Penelitian tentang rendahnya pengetahuan petani di desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan koordinator penyuluh Desa Taan sebagai berikut :

“Masyarakat saat ini hanya bisa mengenal pemupukan dan pemangkasan tidak memahami secara terperinci tentang kondisi tanaman kakao, masyarakat jarang mengikuti pelatihan tentang kakao karena biasanya mereka hanya mengandalkan pengalaman dalam bertani”.
(wawancara dari YY).

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa masyarakat petani masih kurang mempunyai kesadaran terhadap peningkatan produksi sehingga masyarakat masih sering tidak tepat

dalam proses pembudidayaan tanaman kakao.

Masyarakat juga menyadari bahwa pengetahuan mereka masih terbatas dalam proses pembudidayaan kakao. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat petani kakao :

“pengetahuan saya tentang berkebun kakao yah saya sendiri yang mempelajarinya berdasarkan pengalaman saya dalam berkebun, tidak pernah mengikuti yang namanya pelatihan”. (wawancara dengan JP)

Hasil wawancara ini menandakan bahwa pengetahuan masyarakat tentang pembudidayaan petani kakao secara mendalam memang kurang. Karena masih banyak dari mereka yang kurang tahu pentingnya cara membudidayakan tanaman kakao yang baik dan benar, selain tidak adanya inisiatif sendiri dari masyarakat untuk menambah wawasan dalam bercocok tanam. Sehingga diperlukan peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat khususnya dalam pengembangan pengetahuan atau sumber daya manusianya.

b) Letak Geografis;

Kabupaten Mamuju terdiri dari perbukitan dan dataran rendah, tetapi lebih mendominasi perbukitan untuk wilayah Kecamatan Tapalang khususnya Desa Taan. Mengingat bahwa Kabupaten Mamuju merupakan bagian dari Provinsi baru dimana pembangunannya diarahkan ke Mamuju bagian utara sehingga pemerintah lebih memeperhatikan kondisi Mamuju bagian utara dari pada Mamuju bagian Selatan. Kondisi ini tentunya mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah karena perhatian pemerintah daerah lebih condong kepada daerah yang menjadi pusat pembangunan. Hasil

penelitian ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala Desa Taan sebagai berikut:

“Untuk wilayah Kecamatan Tapalang memang kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah karena sebenarnya daerah kita ini kurang dikenal apa lagi khususnya dalam bidang pembudidayaan kakao yang dikenal di Kabupaten Mamuju itu hanya Daerah Kalukku Mamuju bagian Utara. Daerah ini dikenal sebagai pembudidaya tanaman kakao juga, ditambah lagi pembangunan itu diarahkan ke Mamuju bagian utara sehingga daerah bagian lain menjadi kurang diperhatikan”. (wawancara RD).

Hasil wawancara diatas memang menandakan bahwa wilayah Kecamatan Tapalang bukan menjadi salah satu prerioritas dalam hal pembudidayaan tanaman kakao. Karena faktor situasi wilayah Kabupaten Mamuju saat ini masi dalam proses pembangunan yang dimana proses pembangunan tersebut di pusatkan ke daerah mamuju bagian utara sehingga Mamuju bagian selatan kurang diperhatikan.

c) Tenaga Penyuluh

Tujuan dari hadirnya tenaga penyuluh untuk mendampingi petani dalam pembinaan dari perawatan hingga pemanenan. Tenaga penyuluh untuk saat ini di Kecamatan Tapalang masih sangat sedikit, hal ini terlihat dengan masih adanya tenaga penyuluh yang membina lebih dari satu desa dan bidang pengetahuannya yang bukan pada disiplin ilmunya. Berikut hasil wawancara terhadap staf dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mamuju:

“Inilah yang sebenarnya menjadi permasalahan khususnya di Dinas ini karena disamping tenaga penyuluh kita yang kurang ditambah dengan tenaga penyuluh yang ada itu bukan pada bidang keilmuannya sehingga terkadang penyuluhan itu tidak dilakukan atau jarang dilakukan karena mereka tidak tahu”. (Hasil wawancara SI)

Dari hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa untuk di dinas Kehutanan dan Perkebunan itu masih kekurangan pekerja yang ahli dalam bidangnya dan ini menjadi tugas pemerintah daerah untuk menemukan solusi dari masalah di dinas Kehutanan dan Perkebunan ini.

E. PENUTUP

Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju itu tersusun dengan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan daftar usulan rencana kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggung jawaban. Akan tetapi hasil dari pencapaian untuk pemberdayaan masyarakat itu belum tercapai dengan baik. Dimana harapan pencapaian itu bisa sampai pada masyarakat petani menjadi sejahtera dan mampu lebih mandiri.

Dari paparan diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mamuju telah merealisasikan berbagai program sebagai bentuk upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan sosial namun kebijakan ini tidak terlaksana dengan baik karna berbagai macam faktor;

2. Beberapa faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju. Faktor pendukung yaitu adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pembudidayaan tanaman kakao, kemudian adanya upaya pemerintah untuk membantu masyarakat dalam bidang produksi dan pemerintah juga memberikan bantuan berupa modal kepada masyarakat untuk pengembangan budidaya tanaman kakao. Sedangkan faktor penghambat yakni kurangnya kelembagaan yang menaungi masyarakat dalam pembudidayaan tanaman kakao sehingga masyarakat hanya bisa mengandalkan pengalaman mereka dalam pengelolaan tanaman kakao.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju di masa akan datang. Adapun saran-saran yang dimaksud adalah :

1. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian yang lebih khusus kepada petani agar para petani bisa mensejahterakan kemandirian mereka;
2. Pemerintah Daerah harusnya lebih banyak menyiapkan lembaga yang bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat petani;
3. Pemerintah Daerah harus lebih banyak menyiapkan tenaga penyuluh yang lebih handal tentunya dalam bidang kakao agar masyarakat benar-benar bisa menyerap tentang

- pengajaran-pengajaran penyuluhan yang telah diberikan;
4. Untuk masyarakat petani kakao hendaknya senantiasa mengikuti program pemerintah khususnya dalam bidang pelatihan-pelatihan tentang tanaman kakao, agar masyarakat bisa menambah pengalaman yang banyak dalam bertani;
 5. Para penyuluh harus lebih terfokus kepada peningkatan pemahaman petani dengan melakukan pendampingan secara intensif, bukan dengan hanya menggugurkan kewajiban namun tidak ada manfaat yang didapatkan dari tujuan program tersebut.

Rasyid, Ryaas. 1997. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yarsif Watampone.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2010. *Pengertian Pemberdayaan Masyarakat*. [http:// tesisdisertasi.blogspot.com/2010/03/pengertian-pemberdayaanmasyarakat.html](http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/03/pengertian-pemberdayaanmasyarakat.html). Diakses 02 April 2012.
- Direktur Jenderal Perkebunan, 2009. *Pedoman Umum Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional Tahun 2009-2011*.
- Friedmann, John. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. New York. Wiley-Blackwell.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997, *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Labobo, Muhammad. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta :PT RajagrafindoPersada
- Prijono, S. dan Pranarka, 2005. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta : CSIS.